



STRATEGI KERJASAMA KODAM III/SILIWANGI DALAM MENDUKUNG PROGRAM KETAHANAN PANGAN NASIONAL

Ahmad Ali Akbar¹, Sigit Purwanto², Thomas Gabriel³

ali.marvellouzs@gmail.com, sigit.purwanto@idu.ac.id, thomasabriel@gmail.com

¹²³Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Korespondensi penulis: ali.marvellouzs@gmail.com

Abstrak. Program ketahanan pangan menjadi kegiatan yang paling krusial di Indonesia saat ini melibatkan Komando Daerah Militer sebagai pelaksana program. Pelibatan ini menunjukkan berbagai strategi dilakukan untuk mencapai target swasembada pangan. Akan tetapi permasalahan cuaca dan iklim masih menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan dan ditemukansolusi agar program ketahanan pangan berjalan optimal, terutama di wilayah Jawa Barat yang beberapa wilayahnya ditetapkan sebagai lumbung pangan nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi kerjasama yang dilakukan oleh Kodam III/Siliwangi dalam mendukung program ketahananpangan nasional, dan juga menganalisis hambatannya. Metode dari penelitian yaitu kualitatif dengan desain penelitian studi kasus kegiatan program ketahanna pangan di Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang peran besar yang diberikan oleh Kodam III/Siliwangi dalam program ketahanan pangan melalui satuan komando kewilayahan dengan kerangka tugas pembinaan teritorial menempatkan strategi kerjasama dengan Dinas Pertanian, Bulog dan Kelompok Tani. Melalui sinergi dan kolaborasi dengan memanfaatkan potensi sumber daya mausia dan alam dari pihak terlibat menunjukkan kemampuan untuk mencapai target swasemada pangan. Hal ini diimplementasikan oleh Kodim 0616/Indramayu dengan capaian pada pelaksanaan produksi sampai pada masa panen. Strategi kerjasama dengan pembinaan teritorial memberdayakan wilayah dan meningkatkan semangat daya juang antar lembaga. Namun, masih ditemukan hambatan ancaman hujan atau kekeringan yang berkepanjangan berpengaruh pada proses produksi sampai pada target panen serta kendala sarana dan prasarana yang masih belum memadai. Keadaan ini yang masih terus diupayakan oleh pihak-pihak yang berkolaborasi, dan membutuhkan inovasi teknologi untuk menyesuaikan pada ancaman ini terutama dengan mengembangkan platform digital yang mengintegrasikan data prediksi cuaca, produksi, dan distribusi pangan sehingga semua pihak dapat merespons cepat terhadap ancaman iklim ekstrem.

Kata kunci: strategi, kerjasama, pembinaan teritorial, ketahanan pangan, hambatan

Abstract. The food security program is currently the most crucial initiative in Indonesia, with the Regional Military Command serving as the program's implementing agency. This involvement demonstrates the various strategies being employed to achieve the goal of food self-sufficiency. However, weather and climate issues remain challenges that require attention and solutions to ensure the food security program runs optimally, particularly in West Java, where several regions have been designated as national food baskets. This study aims to analyze the cooperation strategies implemented by Kodam III/Siliwangi in supporting the national food security program, as well as to identify the obstacles involved. The research method is qualitative, employing a case study design focused on food security program activities in West Java Province. The results of this research explain the significant role played by Kodam III/Siliwangi in the food security program through its regional command units, which, within the framework of territorial development duties, prioritize strategies for cooperation with the Department of Agriculture, Bulog, and farmers' groups. Through synergy and collaboration by leveraging the human and natural resources of the parties involved the program has demonstrated the ability to achieve food self-sufficiency targets. This has been implemented by Kodim 0616/Indramayu, with achievements ranging from



production through to harvest. A collaborative strategy involving territorial development empowers local areas and boosts the fighting spirit among institutions. However, obstacles remain, such as the threat of prolonged rain or drought affecting production processes and harvest targets, as well as inadequate facilities and infrastructure. Collaborating parties continue to address these challenges, which require technological innovation to adapt to these threats particularly through the development of a digital platform that integrates weather forecast data, production data, and food distribution data—so that all parties can respond quickly to extreme weather events.

Keywords: strategy, cooperation, territorial development, food security, obstacles.

1. Pendahuluan

Pada perkembangannya di berbagai dunia akan menghadapi potensi bencana kelaparan akibat perubahan iklim sebagai konsekuensi dari menurunnya hasil panen dan gagal panen. (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, 2023) Perubahan iklim sebagai tantangan global yang membawa dampak berarti bagi seluruh dunia, terutama bagi negara-negara berkembang. Negara-negara ini, diketahui memiliki sumber daya yang terbatas dan rentan terhadap guncangan eksternal, terutama ketika menghadapi risiko meningkat tentang upaya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonominya. Hal ini karena adanya ketergantungan pada sektor pertanian, yang sangat sensitif akan perubahan suhu, pola curah hujan, dan frekuensi kejadian cuaca ekstrem (IPCC, 2023). Dan juga diprediksi melalui FAO, bahwa akan terdapat lebih dari 500 juta petani dengan skala kecil yang memproduksi 80 persen dari stok pangan dunia, menjadi yang paling rentan terhadap perubahan iklim, dan terjadi di berbagai belahan dunia tanpa memandang negara tersebut besar, kecil, maju atau berkembang. Kerentanan ini dipengaruhi kenaikan suhu global yang akhirnya memberikan tekanan tambahan pada sumber daya air sehingga menghasilkan water hotspot atau krisis air. (Dialog Nasional Antisipasi Dampak Perubahan Iklim untuk Pembangunan Indonesia Emas 2045, 2023)

Keadaan ini juga masuk pada ancaman pertahanan Negara dari ancaman nonmiliter karena berpengaruh terhadap dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi informasi serta keselamatan umum. Ancaman non militer yang paling signifikan dalam kehidupan masyarakat adalah pangan, yaitu sebagai pemenuhan kebutuhan hidup utama masyarakat dalam menjamin pertahanan negara.

Dalam rangka menyediakan pangan masyarakat sebagai wujud ketahanan pangan dalam negeri yang telah dituangkan ke dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Maka sektor pertanian diharapkan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Indonesia. (Kementerian Pertanian, 2024). Dinamika perkembangan lingkungan strategis baik global, regional maupun nasional, telah menciptakan spektrum ancaman yang semakin kompleks dan berimplikasi terhadap pertahanan negara. (Kemhan RI., 2017) keadaan ini menempatkan Tugas TNI, Sesuai dengan amanat UU RI nomor 3 tahun 2025 peran TNI dalam OMSP, dilaksanakan pada tanggal 4 Desember Tahun 2023, TNI bersama Kementerian Pertanian, Panglima TNI menyetujui MoU dengan Menteri Pertanian tentang Dukungan Pelaksanaan Pembangunan Pertanian. Hal ini ditujukan guna

mempercepat peningkatan produksi dan mengembalikan swasembada pangan, serta memperkuat pertanian guna menghadapi ancaman dampak El Nino.

Perlu adanya pemantapan ketahanan pangan dengan berlandaskan pada kemandirian dan kedaulatan pangan yang didukung oleh sub sistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan yang terintegrasi. Pembangunan nasional di Indonesia merupakan suatu proses yang kompleks dan multidimensional, di mana sektor pertanian memegang peranan yang sangat penting. Jawa Barat, sebagai salah satu provinsi yang dikenal sebagai lumbung pangan nasional, Jawa Barat, sebagai salah satu daerah dengan luas tanam yang cukup besar, berhasil mencapai produksi padi sebesar 9,10 juta ton GKG. Indramayu menjadi salah satu daerah penghasil beras terbesar di Jawa Barat dengan jumlah mencapai 1,4 juta ton GKG. (Diskominfo Indramayu, 2026) Indramayu menjadi satu-satunya kabupaten yang diberi *pilot project* dari 27 kabupaten/kota di Jabar.

Akan tetapi, terdapat kendala faktor eksternal dari kendala terkait perubahan iklim bahwa kerentanan Jawa Barat terhadap kekeringan menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan. Kekeringan dapat mengganggu siklus panen, mengurangi hasil panen, dan menghambat akses terhadap sumber daya pangan yang penting, yang pada akhirnya memengaruhi kesejahteraan penduduk pedesaan dan perkotaan. meningkatnya variabilitas iklim dan meningkatnya frekuensi kejadian kekeringan di Jawa Barat. (Gusti Rusmayadi, 2023) Kekeringan ini berpotensi merusak tanaman, menyebabkan kerugian bagi petani dan menaikkan harga pangan, sehingga mempengaruhi keterjangkauan dan aksesibilitas pangan bagi masyarakat luas. Tantangan ini semakin diperparah dengan sifat kekeringan yang tidak dapat diprediksi dan tidak menentu, yang dapat menyulitkan petani untuk membuat keputusan yang tepat mengenai pemilihan tanaman, waktu tanam, dan praktik irigasi. (Korčok, 2022).

Dalam menghadapi tantangan ini, kehadiran TNI dibutuhkan untuk mendukung program nasional, dikarenakan TNI memiliki kapasitas dan kapabilitas sejalan dengan tugasnya pembinaan wilayah pertahanan khususnya oleh TNI Angkatan Darat melalui pelaksanaan pembinaan teritorial (binter). TNI dikatakan mampu mendampingi dan menyelesaikan permasalahan bersama di lapangan. Menggunakan starteg kerjasama menempatkan kolaborasi antara TNI dalam penelitian ini kepada Kodam III/Siliwangi, Kementerian Pertanian kepada Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat, Bulog dan juga Kelompok Tani menjadi sangat penting. Pelaksanaan kerjasama merupakan peluang dan juga tantangan terutama dalam menyatukan dua instansi, perbedaan kultur dan pelaksanaan kerja dalam menyelesaikan program menjadi hal yang perlu diperhatikan.

2. Tinjauan Pustaka

Secara umum, ketahanan pangan mencakup 4 (empat) aspek, yaitu kecukupan (*sufficiency*), akses (*access*), keterjaminan (*security*), dan waktu (*time*) (Baliwaty, 2004). Dengan adanya aspek tersebut maka ketahanan pangan dipandang menjadi suatu sistem, yang merupakan rangkaian dari tiga komponen utama yaitu ketersediaan dan stabilitas pangan (*food availability dan stability*), kemudahan memperoleh pangan (*food accessibility*) dan pemanfaatan pangan. Pada penelitian ini menjadikan TNI melalui Kodam III/Slw sebagai salah satu obyek memerlukan pemahaman tentang strategi militer menurut Basil H. Liddle Hart membuat definisi dari strategi sebagai seni dalam menyebarkan dan menerapkan satuan-satuan militer dalam rangka memenuhi sasaran dari kebijakan. Lebih lanjut dikatakannya bahwa



keberhasilan suatu strategi tergantung kepada perhitungan yang baik dan mengkoordinasikan sasaran dan alat-alat yang digunakan. (Hart, 2012). Menganalisis terkait startegi dengan kerjasama diketahui bahwa menurut Charlie H. Cooley, kerja sama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama pada saat bersamaan, mempunyai cukup pengetahuan, dan kesadaran terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan.

Pelaksanaan strategi kerjasama yang dilakukan oleh Kodam III/Slw menjadi kerangka pelaksanaan pembinaan territorial yang sesuai Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma (Tridek), dalam strategi pertahanan negara adalah mencegah, menangkal dan mengatasi ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara dalam berbagai bentuk dan perwujudannya. Hal ini disesuaikan dengan terwujudnya kemandirian TNI-Rakyat. Pembinaan Teritorial) sesuai dengan Doktrin KEP (Kartika Eka Paksi) dan Buku Petunjuk Induk Binter, adalah metoda dan kegiatan serta kemampuan teknis militer yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengerahan dan pengendalian potensi wilayah dengan segenap aspeknya untuk kepentingan Tugas Pokok TNI dalam rangka Pertahanan Negara.

3. Metode Penelitian

Dengan metode kualitatif deskriptif, Menurut (Creswell,2019) menyebut bahwa penelitian dengan metode kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Untuk desain penelitian membantu peneliti dalam menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. (Sekaran, 2018). Pada penelitian ini menggunakan desain Studi kasus (*case study*). Penelitian ini dilaksanakan di Mabesad, Kodam III/Siliwangi, Kodim 0616/Indramayu, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat, Bulog dan Perwakilan kelompok tani yang juga didukung dengan data-data sekunder dalam menunjang penelitian.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik wawancara terstruktur yang didapat dari informan atau narasumber yang menjadi subyek penelitian. Didukung dengan teknik dokumentasi. Melalui teknik ini peneliti berusaha untuk memperoleh data dari hasil sumber tertulis. Pada penelitian ini, data diperoleh dari hasil wawancara dilakukan pengujian silang (*cross check*) dengan menggunakan data lain, baik data dari sumber tertulis maupun sumber lainnya. Penelitian kualitatif di dalamnya tidak ada pendekatan yang tunggal dalam menganalisis data. Pemilihan metode sangat tergantung pada *research questions*.

4. Hasil dan Pembahasan

Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertanian dan TNI yang ditandatangani pada tahun 2023 menegaskan komitmen kedua institusi untuk bekerja sama dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan pertanian. Melalui kerjasama ini, TNI diharapkan dapat

memberikan dukungan dalam hal pendampingan, pelatihan, dan penyediaan sarana prasarana yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Strategi TNI yang sudah dilakukan dalam sektor pertanian di Jawa Barat mencakup berbagai aspek, membangun perencanaan dan pelaksanaan kerjasama dalam pendampingan bersama Dinas Pertanian Daerah, pendampingan petani hingga pengelolaan lahan khususnya lahan tidur. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat (2025), provinsi ini menyuplai sekitar 30% dari total produksi padi nasional, menjadikannya sebagai salah satu penghasil padi terbesar di Indonesia. Dengan luas lahan pertanian padi mencapai sekitar 600.000 hektar, Jawa Barat berperan krusial dalam menjaga ketahanan pangan nasional (BPS, 2024).

Mengawali tahun 2025, demi tercapainya swasembada pangan nasional, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkebunan kembali gelar tanam perdana padi gogo pada sela tanaman kopi di kabupaten Bandung, Jawa Barat. Di Indramayu, padi gogo juga menjadi fokus untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani, terutama di lahan yang tidak memiliki irigasi. Upaya ini merupakan bagian dari agenda besar Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan yang lebih cepat dengan mengoptimalkan lahan yang ada. target nasional padi gogo seluas 890 ribu Ha dengan lahan efektif yang dapat ditanami (*Intercropping*) seluas 535 ribu Ha. Selain itu juga, Padi gogo di Jawa Barat sedang digalakkan oleh TNI untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mendukung program Kementerian Pertanian. Program ini bertujuan untuk memanfaatkan lahan kering dan meningkatkan produktivitas pertanian, serta memberikan contoh teknik penanaman yang baik kepada masyarakat. Di bawah ini adalah grafis yang berkaitan dengan strategi Indonesia dengan upaya ketahanan pangan melalui pertanian, yang disebut dengan Tujuh Gema Revitalisasi Pertanian.



Gambar 4.1 Tujuh Gema Revitalisasi Pertanian

Sumber: Kementerian Pertanian (2024)



Dari gambar ini menunjukkan bahwa terdapat permasalahan yang masih perlu diupayakan untuk mewujudkan keberhasilan dalam program ketahanan pangan, antara lain mulai dari lahan, masalah konversi lahan, kepemilikan lahan yang sempit, dan sulitnya akses petani ke lahan terlantar/hutan. Perbenihan dan Pembibitan dengan lemahnya sistem produksi dan distribusi benih dan hambatan pengembangan benih transgenik. Infrastruktur dan sarana dimana tingginya kerusakan jaringan irigasi, tingginya biaya produksi dan transportasi. Sumber Daya Manusia bahwa terbatasnya jumlah SDM dan masih rendahnya kualitas SDM sangat mempengaruhi. Pembiayaan petani dikarenakan sulitnya petani mendapatkan pinjaman, banyaknya petani gurem/kecil, dan tunggakan KUT yang belum diputihkan. Masalah kelembagaan Petani, yaitu lemahnya kelembagaan petani dan kapasitas kelembagaan yang beragam. Masalah pada bidang teknologi dan Industri Hilir: masih menggunakan alat atau teknologi tradisional dan industri yang belum berkembang.

Berkaitan dengan keadaan ini, Kodam III/Siliwangi memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan wilayah Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat, serta terlibat dalam berbagai operasi militer. Kodam III/Siliwangi sebagai bagian dari Kotama Ops TNI memiliki peranan yang sangat strategis. Sesuai Peraturan Kasad Nomor 69 Tahun 2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tugas Komando Daerah Militer. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Kodam melaksanakan fungsi utama yaitu pertempuran dan pembinaan teritorial serta fungsi organik yaitu Intelijen, Operasi, Personel, Logistik, Teritorial, Perencanaan serta Pengawasan dan Pemeriksaan. Kodam melalui fungsi utama pembinaan teritorial memiliki kewenangan dalam pengembangan, pengerahan dan pengendalian semua potensi wilayah pertahanan yang ada di wilayahnya termasuk pemberdayaan wilayah pertahanan.

Berkaitan dengan program ketahanan pangan di Jawa Barat melalui Kodam III/Slw menunjukkan bahwa terdapat strategi yang menempatkan Kotama Ops TNI berperan penting dalam program ketahanan pangan di Jawa Barat. Strategi ini disesuaikan dengan program Pemerintah Republik Indonesia yaitu mendukung program pemerintah dalam mewujudkan Visi Presiden 2024-2029 yang dikenal dengan Asta Cita Presiden RI, khususnya mewujudkan Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, dan Ekonomi. Strategi ini disusun melalui Kementerian Pertanian dan Mabes TNI untuk percepatan swasembada pangan, yang berfokus pada meningkatkan produksi jagung, kedelai, dan padi dengan mengoptimalkan teknologi pertanian dan lahan. Termasuk didalamnya dengan peningkatan efisiensi sistem distribusi pupuk dan benih untuk meningkatkan produktivitas petani. Kemudian didukung dengan strategi menempatkan kerjasama lintas sektor, termasuk dengan TNI dan Bulog bersama Dinas Pertanian daerah adalah bentuk upaya efektif dalam mendukung keberhasilan pemenuhan pangan.

Strategi dengan memastikan distribusi pangan tetap aman terutama di wilayah Jawa Barat, menempatkan Kodam III/Slw terlibat penting dan perannya tidak hanya mendampingi tetapi juga mengawal pendistribusian terutama dari isu-isu mafia yang menghambat distribusi pangan atau hasil produksi. Strategi kerjasama ini juga sejalan dengan adanya upaya membangun Jawa Barat sebagai lumbung pangan nasional. Melalui strategi yang dijalankan



ini diarahkan pada hasil pertanian yang ada akan didistribusikan ke masyarakat sekitar, sekaligus menjadi bagian dari upaya jangka panjang memperkuat ketahanan pangan nasional. Strategi dengan memanfaatkan lahan kosong di berbagai daerah demi mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi dan kemandirian pangan. menunjukkan adanya konsistensi dan sinergi dalam strategi ketahanan pangan yang diterapkan di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Dari data yang diperoleh, dapat diidentifikasi beberapa tema utama yang menjadi fokus dalam pengolahan data. Pada tema strategi ketahanan pangan hulu ke hilir dan sinergi lintas sektoral, Informan menjelaskan bahwa strategi ketahanan pangan dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir, dengan pembinaan teritorial dan sinergi antara pemerintah serta masyarakat. Hal ini diperkuat dengan pernyataan informan yang menekankan pentingnya pelaksanaan pembinaan teritorial (binter) oleh Kodim dan keterlibatan aktif instansi terkait seperti Dinas Pertanian, Polri, dan Bulog dalam mendukung ketahanan pangan. Pendekatan ini menunjukkan implementasi konsep pembangunan berkelanjutan dan kolaborasi lintas lembaga.

Pada tema pemanfaatan dan penguatan sumber daya lokal, strategi penguatan pangan berbasis sumber daya lokal menjadi fokus penting yang diungkapkan informan bahwa penggunaan forum perangkat daerah dan pengoptimalan lahan serta distribusi pupuk dan benih secara aman menunjukkan pendekatan bottom-up yang efektif dalam pembangunan ketahanan pangan. Pelaksanaan yang partisipatif menekankan peran aktif komunitas lokal dalam pengelolaan sumber daya. Pada tema pendampingan teknis dan sosialisasi oleh Kodam III/Slw dan Satkowil di Jawa Barat melalui Babinsa secara umum dalam pendampingan teknis kepada petani, percepatan tanam, dan sosialisasi program inovatif seperti IPHA dan SALIBU menunjukkan integrasi fungsi pertahanan dengan pembangunan sosial ekonomi daerah. Pendekatan ini merupakan contoh konkret. Pada tema koordinasi dan pengamanan produksi serta distribusi pangan informan menambahkan dimensi koordinasi strategis melalui pembentukan Satgas Pangan dan pengamanan proses serapan gabah yang melibatkan Bulog, TNI, dan pemerintah daerah. Ini menegaskan pentingnya tata kelola pangan yang terintegrasi dan pengawasan distribusi yang efektif, yang merupakan aspek penting dalam manajemen rantai pasok pangan. Pada tema gotong royong dan kegiatan kolektif sebagai strategi pendukung kegiatan gotong royong massal untuk penanaman padi merupakan contoh nyata penerapan nilai sosial dan budaya lokal yang mendukung keberhasilan program ketahanan pangan. Pendekatan ini mengandung nilai-nilai sosial modal dan kerjasama komunitas yang krusial dalam pembangunan berkelanjutan.

Triangulasi sumber pada penelitian ini menunjukkan adanya kesamaan pandangan dan strategi antar narasumber, yang memperkuat validitas data. Meskipun terdapat variasi fokus, seperti penekanan pada pengamanan distribusi dan peran teknis Babinsa, secara keseluruhan terdapat kohesi dalam visi dan pelaksanaan strategi ketahanan pangan berbasis sinergi lintas sektor, pemberdayaan sumber daya lokal, dan koordinasi yang efektif.

Seperti yang dilaksanakan di wilayah Kodam III/Slw yang turut serta dalam kegiatan yang dilakukan bersama instansi terkait, dengan tujuan para Babinsa sebagai pendamping pada program ini, mendapatkan tugas baru yang tidak hanya menjadi penjaga keamanan wilayah,



tetapi juga penggerak kemandirian pangan masyarakat. Kodam III/Slw mengikutsertakan para prajurit dalam pelatihan kemudian mendampingi masyarakat dalam memanfaatkan lahan pekarangan, kebun, hingga lahan tidur agar produktif menghasilkan buah dan sayur. Hal ini merupakan bentuk implementasi dari strategi kerjasama yang menjadikan kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan TNI/Babinsa dalam memperkuat ketahanan pangan masyarakat melalui penerapan teknologi budidaya pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Diketahui bahwa Kodam III/Slw juga melaksanakan kegiatan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) melaksanakan kegiatan Hari Krida Pertanian yang sejalan dengan program ketahanan pangan nasional dengan melakukan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai strategi yang menunjukkan hasil nyata pada menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah masyarakat. Kegiatan ini diarahkan untuk Komoditas Berkualitas dengan Harga Terjangkau dengan memastikan kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi dengan harga di bawah pasar. Hal ini didukung dengan kegiatan yang melibatkan 5.000 Babinsa Kodam III/Siliwangi diberikan pembekalan pengetahuan dan kemampuan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) pertanian bertujuan untuk mampu melaksanakan pemberdayaan wilayah secara optimal. Sesuai dengan arahan Pangdam III/Slw bahwa penting bagi para Babinsa agar saat berada di lapangan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan teknis para petani, dengan melaksanakan pendampingan program pembangunan pertanian, peningkatan produksi, peningkatan kapasitas SDM dan optimalisasi lahan TNI. (Portal Jabar, 2024)

Strategi kerjasama yang dilakukan oleh Kodam III/Slw dalam mendukung program ketahanan pangan dilaksanakan bersama Forkopimda sampai ke Forkopimcam, strategi dengan kerjasama ini membuka peluang koordinasi yang luas dengan berbagai instansi di daerah. Selain itu strategi kerjasama yang dilakukan oleh Kodam III/Slw ditunjukkan dengan kerjasama dengan Bulog sesuai dengan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) merupakan penugasan Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang tertuang dalam Surat Kepala Bapanas Nomor 173/TS.02.02/K/7/2025 tertanggal 8 Juli 2025. Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan perwujudan program pemerintah dengan menempatkan sinergi antara BULOG dan TNI akan terus diperkuat ke depan melalui kegiatan serupa yang akan digelar di satuan-satuan TNI terutama di wilayah Kodam III/Siliwangi. (Humas Perum BULOG, 2025).

Selain itu, dalam mendukung Bulog sesuai dengan mandate yang diberikan Presiden melalui Kementerian Pertahanan, TNI melalui Kodam yaitu untuk membangun 25.000 unit gudang sementara yang akan ditempatkan di seluruh Kodam. Strategi ini disampaikan pada acara penyaluran bantuan pangan beras sekaligus peluncuran program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang digelar terpusat di Lapangan Makodam III/Siliwangi. (Rohanda, 2025)

Kegiatan yang sudah dilaksanakan lainnya dibawah Kodim 0616/Indramayu bersama petani yaitu dalam Pendampingan Pertanian MT Rendeng TA 2026 di Desa Sukawera,



Anggota Koramil 1605/Sukagumiwang Kodim 0616/Indramayu, Serka Catu melaksanakan kegiatan pendampingan pertanian musim tanam rendeng (MTR) TA 2026 di area lahan sawah milik Bapak Tohari, Kelompok Tani (Poktan) Mukti Jaya, Desa Sukawera, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu. Kegiatan pendampingan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membantu serta memastikan kondisi pertanian petani tetap optimal menjelang masa panen. Koordinasi ini memungkinkan pemanfaatan sumber daya secara optimal, pengawasan pasar yang ketat, serta respons cepat terhadap dinamika harga dan pasokan pangan.

Dikaitkan dengan konsep strategi pertahanan negara diwujudkan dengan mentransformasikan potensi sumber daya dan sarana prasarana nasional menjadi kekuatan pertahanan negara yang dilandasi dengan pemahaman kesadaran dan kemampuan bela negara. Kekuatan pertahanan negara terbangun dari kekuatan pertahanan militer, terdiri atas komponen utama, komponen cadangan, komponen pendukung dan kekuatan pertahanan nirmiliter t dari sumber daya manusianya juga kemampuan dari sumber daya alam, yang terdiri dari unsur utama dan unsur lain kekuatan bangsa. Potensi yang dimiliki Provinsi Jawa Bara dengan menempatkan personel dari Kodam III/Slw sebagai komponen utama, petani dan masyarakat sebagai komponen cadangan, dan sumber daya alam yang tersedia dan memiliki potensi sebagai komponen pendukung.

Implementasi yang sudah dijalankan oleh Kodam III/Slw dalam melakukan strategi kerjasama perlu dianalisis dari penjelasan bahwa strategi memiliki faktor yang perlu diperhatikan yaitu : faktor pertama adalah metode, dimana dari segi bahasa, metode berasal dari dua kata yaitu "mata" (melalui) dan "hadas" (jalan, cara). Adapun yang menjadi cara atau jalan yang dilakukan yaitu berkomitmen dan turut berperan aktif mendukung kegiatan dan program Pemerintah dengan bekerjasama ikut serta dalam berbagai kegiatan teknis dan non-teknis, seperti pendampingan pertanian, penyuluhan, serta koordinasi lintas sektor dengan berbagai instansi terkait. Strategi kerjasama yang dijalankan tidak hanya bersifat top-down, melainkan juga melibatkan pendekatan kolaboratif yang mengedepankan sinergi antar pemangku kepentingan. Kodam III/Siliwangi berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan pemerintah daerah, Bulog, Dinas Pertanian, dan masyarakat. Metode ini sesuai dengan teori jaringan sosial (social network theory) yang menekankan pentingnya hubungan dan interaksi antar aktor dalam mencapai tujuan bersama.

Namun dalam implementasinya masih terdapat hambatan Kodam III/Slw dalam melaksanakan strategi kerjasama dalam mendukung program ketahanan pangan di wilayah Jawa Barat. Sesuai data yang didapat terkait umur petani terutama di wilayah Indramayu dikatakan usianya sudah mencapai rata-rata berumur 50 tahun sekitar 75%. Keadaan ini tertentu menjadi hambatan tersendiri tidak hanya di masa sekarang tetapi menjadi tantangan di masa depan. Selain itu dari sisi ancaman iklim yang menjadikan strategi kerjasama terkendala karena hasil yang didapat tidak optimal, yaitu dari curah hujan yang tinggi dan saluran pembuangan air yang menyempit mengakibatkan puluhan hektar sawah di Desa Nunuk dan Desa Tugu, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu, terendam banjir. Kondisi ini mengancam hasil panen petani, terutama benih padi yang sudah ditebar dalam kegiatan bersama yang



dilakukan petani dan Babinsa. Dari hujan ini dengan adanya genangan air juga menimbulkan munculnya hama dan penyakit tanaman, dengan dampak besarnya gagal panen. Hambatan-hambatan yang ada ini mengakibatkan para petani membutuhkan bantuan Pemerintah daerah setempat khususnya di Indramayu, dan TNI melalui Kodam III/Siliwangi memiliki tugas untuk membantu permasalahan ini. Praktek ini yang menunjukkan perlunya strategi kerjasama dalam penyelesaian hambatan yang terjadi.

Hambatan kerjasama antar instansi dari semua narasumber secara umum mengakui adanya hambatan dalam kerjasama antar instansi, meskipun penekanan detailnya berbeda. Informan menyoroti perbedaan sistem kerja, dari informan lain menekankan kurangnya kemampuan adaptasi petani dan Babinsa, sementara yang lainnya ada yang menyoroti peran penting TNI dan kendala sarana-prasarana. Ini menunjukkan bahwa hambatan kerjasama adalah isu sentral yang diakui oleh semua pihak. Dari beberapa narasumber secara jelas menyebutkan pengaruh cuaca buruk seperti hujan berlebih, kekeringan, dan banjir yang mengganggu produksi pangan. Ini menjadi konfirmasi bahwa faktor lingkungan eksternal merupakan hambatan yang nyata.

Pada aspek regenerasi petani dan babinsa, Narasumber juga sepakat bahwa regenerasi petani yang sudah berumur tua dan kurangnya peningkatan kapasitas Babinsa menjadi hambatan dalam pelaksanaan strategi ketahanan pangan. Ini menunjukkan konsensus akan perlunya peningkatan sumber daya manusia. Sedangkan untuk aspek hambatan dari sarana dan prasarana, narasumber juga menegaskan pentingnya sarana dan prasarana seperti irigasi, akses pasar, dan fasilitas produksi.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat konfirmasi kuat mengenai hambatan kerjasama antar instansi, pengaruh iklim, serta kebutuhan regenerasi petani dan Babinsa. Selain itu, ditemukan perbedaan fokus antara kelompok narasumber yang lebih menyoroti aspek distribusi, peran TNI, dan sarana-prasarana, sedangkan kelompok lainnya lebih fokus pada kapasitas sumber daya manusia dan sistem kerja internal yaitu dari TNI baik dari Kodam III/Slw dan juga Satkowil termasuk Kodim 1616/Indramayu. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia menyaksikan meningkatnya harga bahan pangan, gagal panen akibat cuaca ekstrem, serta gangguan rantai pasok global yang memengaruhi jutaan orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa krisis pangan bukan lagi ancaman masa depan, melainkan realitas yang mulai dirasakan banyak negara. Di tengah perubahan iklim yang semakin tidak menentu, Indonesia sedang menjalankan program ketahanan pangan yang melibatkan TNI sebagai instansi yang mampu mendampingi Kementerian Pertanian karena memiliki Satkowil di tiap wilayah sampai ke desa. Kodam III/Siliwangi dalam program ini sudah menunjukkan perannya dengan melakukan berbagai strategi termasuk melaksanakan kerjasama dengan mewujudkan komitmennya.

Akan tetapi dari permasalahan yang bersifat eksternal berpengaruh besar pada kemampuan internal dari strategi kerjasama tersebut. Pengaruh dari perubahan iklim menimbulkan tantangan terbesar bagi sektor pertanian. Kenaikan suhu, perubahan pola curah hujan, kekeringan, banjir, dan cuaca ekstrem secara langsung memengaruhi produktivitas lahan pertanian. Banyak wilayah yang sebelumnya subur mulai mengalami penurunan hasil panen



akibat kondisi cuaca yang semakin tidak stabil. Musim tanam menjadi sulit diprediksi, sementara serangan hama dan penyakit tanaman meningkat akibat perubahan ekosistem. Keadaan ini terjadi di wilayah Jawa Barat, menjadikan krisis iklim ini menemoatkan petani kecil dengan keterbatasan modal dan teknologi, terjebak dalam menghadapi risiko gagal panen akibat cuaca ekstrem tanpa perlindungan ekonomi yang memadai. Selain itu, petani juga menghadapi persoalan akses lahan, harga pupuk, distribusi hasil panen, dan tekanan pasar global.

Meskipun wilayah Jawa Barat terkenal dengan keadaan wilayah yang cukup strategis menunjang kegiatan pertanian, termasuk Kabupaten Indramayu, sebagai salah satu daerah agraris, kembali membuktikan kontribusinya dalam mengamankan kebutuhan pangan nasional. Akan tetapi, keadaan cuaca dan iklim menjadi hal yang tidak dapat dihindari.

Dari permasalahan hambatan, dipahami bahwa yang dijalankan mengacu pada analisis SWOT wilayah yaitu kekuatan (kesuburan lahan, keberadaan petani yang berpengalaman), kelemahan (keterbatasan teknologi, perubahan iklim), peluang (program pemerintah, dukungan institusi), dan ancaman (kerusakan lingkungan, fluktuasi pasar) dan dari para narasumber menitikberatkan pada strategi kerjasama Kodam III/Siliwangi dengan Dinas Pertanian, Bulog, dan petani berfokus pada sinergi dan koordinasi lintas sektor untuk mendukung ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat. Kerjasama ini meliputi Pendampingan teknis kepada petani melalui Babinsa dan Dinas Pertanian, Pengelolaan lahan tidur dan optimalisasi hasil pertanian, Penyimpanan dan distribusi hasil panen melalui Bulog untuk menjaga stabilitas harga, Penguatan komunikasi dan koordinasi rutin antar pihak terkait. Strategi ini menekankan kolaborasi aktif sebagai kunci keberhasilan pembinaan teritorial dan pengelolaan sumber daya lokal.

Kekuatan yang menjadi pendorong terlaksananya strategi kerjasama dari Kesuburan lahan yang mendukung produksi pertanian. Keberadaan petani yang berpengalaman dan memiliki pengetahuan lokal. Strategi kerjasama memanfaatkan kekuatan ini dengan meningkatkan kapasitas petani melalui pelatihan dan pendampingan, serta memanfaatkan potensi lahan secara optimal. Didukung dengan sarana dan prasarana yang diberikan dari Kementerian pertanian dan Bulog yang menjadi kolaborasi dalam mewujudkan ketahanan pangan di Jawa Barat. Seperti Dukungan institusi seperti Bulog dalam penyimpanan dan distribusi pangan. Kodam III/Siliwangi memanfaatkan peluang ini dengan menjalin kemitraan yang kuat dan mengintegrasikan program pemerintah dalam pembinaan teritorial. Dinas Pertanian mendukung dengan mengadakan pelatihan dan pembinaan kepada personel Kodam III/Slw yang kemudian diteruskan kepada petani, emnajdi kegiatan yang terintegrasi.

Sehingga dapat dipahami bahwa Strategi kerjasama Kodam III/Siliwangi yang dijalankan sesuai dengan analisis SWOT wilayah merupakan contoh penerapan strategi pembinaan teritorial yang adaptif dan responsif terhadap kondisi lokal. Dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang, serta mengatasi kelemahan dan ancaman, Kodam membangun ketahanan pangan dan stabilitas sosial yang berkelanjutan melalui kolaborasi efektif dengan Dinas Pertanian, Bulog, dan komunitas petani.



Pemahaman ini juga dapat dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang berjudul Manajemen Kolaborasi Pemerintah Daerah dalam Strategi Pengelolaan Pertanian Padi di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat Guna Mendukung Program Swasembada Pangan Nasional: Sinergi dengan Kodim 0609/Cimahahi, dengan penemuan penelitian yaitu pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dan koordinator. Kolaborasi melibatkan pemerintah, kelompok tani, penyuluh, swasta, dan Kodim 0609/Cimahahi sebagai penggerak, pendamping, dan pemersatu, khususnya dalam mendukung intensifikasi dan ekstensifikasi sawah. Faktor kunci keberhasilan adalah kepercayaan antaraktor, komunikasi, dukungan kebijakan dan anggaran, serta komitmen TNI AD dalam program TMMD dan Binter yang menyasar infrastruktur pendukung padi.

Sama halnya dengan penelitian ini yang menggunakan pendekatan strategi yang menunjukkan cara, taktik dan teknik apa yang dijalankan dalam mengimplementasikan Kodam III/Siliwangi mendukung program ketahanan pangan melalui kerjasama dengan keterlibatan bersama Dinas Pertanian, bulog dan Petani di wilayah Jawa Barat. Strategi ini perlu dikaitkan dengan pemahaman tentang apa itu ketahanan pangan yang dimaksud dengan indikator ketersediaan pangan. Ketika pangan tersedia, itu berarti bahwa individu dapat memperoleh makanan yang aman dan sehat dalam jumlah yang diperlukan-baik dari produksi dalam negeri maupun impor-serta bantuan pangan, yang memastikan bahwa mereka dapat memenuhi kebutuhan kalori harian mereka.

Dari konsep ini, batasan Kodam III/Slw dalam melaksanakan upaya mendukung program ketahanan pangan dilakukan dengan kerjasama yang menjadi strategi melalui fungsi pembinaan teritorial menjamin ketersediaan pangan secara merata di wilayah Provinsi Jawa Barat dengan program swasembada beras, menjadikan wilayah-wilayah yang ada sebagai lumbung padi nasional. Sama halnya dengan mendukung bulog dan menjadi salah satu instansi yang terkoordinasi dengan TNI dalam hal ini Kodam III/Slw, bahwa Bulog memiliki peran dalam stabilisasi pasokan pangan nasional, terutama beras, sebagai bagian dari ketahanan nasional, dan membutuhkan kolaborasi dengan TNI terutama kepada Kodam untuk menyediakan pembangunan gudang penyimpanan untuk mendukung distribusi pangan ke daerah-daerah yang membutuhkan. Sejalan dengan visi dan misinya yaitu program ini dapat meringankan beban masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi di tengah tantangan global.

Maka dapat dipahami bahwa ketahanan pangan yang efektif harus mencakup seluruh rantai pasok, mulai dari produksi (hulu) hingga distribusi dan konsumsi (hilir), dengan pembinaan teritorial Kodam III/Siliwangi mendukung petani dengan pelatihan, pendampingan teknologi pertanian, dan pengelolaan lahan yang optimal. Hilir dipahami dengan distribusi dan konsumsi, melalui sinergi antara pemerintah, TNI, dan masyarakat memastikan distribusi pangan berjalan lancar dan tepat sasaran, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di pasar lokal. Pembinaan teritorial yang dilakukan Kodam III/Siliwangi merupakan fondasi penting untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan, yaitu kolaborasi dan koordinasi bahwa sinergi lintas sektor antara Bulog, Dinas Pertanian, pemerintah daerah, dan masyarakat petani menjadi integrasi program dan optimalisasi sumber daya.

5. Kesimpulan dan Saran

Kodam III/Siliwangi yang mendapatkan tugas membantu dan mendukung program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan melakukan hal-hal yang signifikan dalam mendukung upaya pertahanan Negara dari aspek nonmiliter, keterlibatan ini membentuk sebuah strategi kerjasama yang diberikan dengan cara membangun kolaborasi bersama Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat, Bulog, dan Kelompok Tani. Selain itu menjadikan Indramayu sebagai salah satu wilayah strategis yang berhasil mewujudkan program swasembada pangan dengan status sebagai lumbung padi nasional. Strategi kerjasama yang dilakukan oleh Kodam III/Slw sebagai Kotama Ops TNI bersama satkowil yaitu Kodim 0616/Indramayu mengimplementasikan strategi kerjasama yang terintegrasi dan sinergis dengan berbagai pihak, seperti Dinas Pertanian, Bulog, pemerintah daerah, dan masyarakat petani. Strategi ini menitikberatkan pada pembinaan teritorial (binter) yang memperkuat kapasitas petani, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta optimalisasi produksi dan distribusi pangan. Melalui pendekatan hulu ke hilir.

Strategi ini tidak bisa dipisahkan dengan menjadikan potensi sumber daya alam dan manusia di wilayah Jawa Barat, khususnya Indramayu, menjadi modal utama dalam mendukung keberhasilan strategi ini. Kondisi wilayah yang subur, jaringan infrastruktur yang memadai, serta pengalaman petani lokal mendukung optimalisasi pelaksanaan program ketahanan pangan. Serta potensi dari instansi Dinas Pertanian dengan SDM dan sarana prasarana, Bulog yang berkompeten dalam suplai hasil panen, dan juga kelompok Tani di Jawa barat. Meskipun pelaksanaan strategi kerjasama ini masih ditemukan hambatan yang signifikan dari pengaruh cuaca dan iklim yang berpengaruh besar dalam kegiatan produksi sampai kegiatan panen dari aspek curah hujan yang besar dan kekeringan panjang, sampai kendala pada sarana dan prasarana pertanian, dapat menghambat pelaksanaan program secara optimal dan merata di seluruh wilayah binaan. Dan permasalahan masih minimnya regenerasi petani yang masih belum optimal.

Maka dari hasil penelitian yang didapat dilihat dari analisis terkait strategi kerjasama dan hambatan dari strategi kerjasama yang dilakukan oleh Kodam III/Siliwangi dalam mendukung keberhasilan program ketahanan pangan yang berdayaguna membangun kekuatan wilayah pertahanan di daerah Jawa Barat dengan kerangka pembinaan teritorial, dapat diproyeksikan dengan adanya hambatan perlu adanya pembaharuan strategi kerjasama dengan pengadaan teknologi terbaru menghadapi ancaman cuaca dan iklim, mengerahkan kemampuan Dinas Pertanian, Bulog dan Kelompok Tani melibatkan tenaga ahli untuk berinovasi seperti membangun platform digital yang mengintegrasikan data cuaca, produksi, dan distribusi pangan sehingga semua pihak dapat merespons cepat terhadap ancaman iklim ekstrem.



Daftar Pustaka

1. Buku

- Baxter, P. &. (2008). Qualitative case study methodology: study design and implementation for novice researchers. *The Qualitative Report*, 13 (4),, 544-559.
- Biddle, B. d. (1966). *Role Theory : Concept and Research*. NewYork : Wiley.
- Glaser, B. &. (1967). *The discovery of grounded theory: strategies for qualitative research*. Aldine Press.
- Hart, B. L. (2012). "*Strategy. " Second Revised Edition, 1967*. New York: Meridian.
- Hipdizah, H., Purwanto, S., Hendarwoto, Y., Duarte, R., Siagian, F., & Anggraeni, D. (2025). Buku ajar doktrin militer. *YPAD Penerbit*.
- Fakhrurozi, M., Syafri, M., Choerudin, A., Purnomo, D., Mendo, A. Y., Musa, M., ... & Akadji, I. (2024). *Pengantar manajemen*. Aikomedia Press.
- Purwanto, S., Dadang, D., Gunawan, R., Hutajul, A. B., & Anggraeni, D. (2025). Buku Ajar Tata Kelola Pertahanan Negara. *YPAD Penerbit*.
- Purwanto, S., Supangat, S., Esterina, M., Souhoka, S., Chandra, F., Hariputra, A., ... & Arianto, T. (2024). *Manajemen sumber daya manusia*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Rangkuty, F. (2018). *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis Bisnis Cara Perhitungan Bobot, Rating, dan OCAI*. Jakarta: PT> Gramedia Pustaka Utama.
- Sekaran, U. (2018). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach*.

2. Jurnal

- Alam, S., Sutanto, R., & Purwanto, S. (2025). Analisis Efektifitas Kerjasama TNI-Polri untuk Menangani Destructive Fishing Guna Mendukung Ekonomi Biru dalam Rangka Pembangunan Nasional. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(11).Gusti Rusmayadi, U. S. (2023). Analisis Sistem Agrometeorologi dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan saat Kemarau. *Jurnal Geosains West Science Vol. 1, No. 03, Oktober 2023*, 143-150.
- Raihannur, N. (2025). Dampak Perubahan Iklim terhadap Ketahanan Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi di Negara Berkembang: Pendekatan Interdisipliner. *MARKET: Journal Multidisciplinary Approaches to Research in Economics, Vol 1, No 2, Agustus 2025*, 69-81.
- Riska Utami Kuswana, P. A. (2025). Manajemen Kolaborasi Pemerintah Daerah dalam Strategi Pengelolaan Pertanian Padi di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat Guna Mendukung Program Swasembada Pangan Nasional: Sinergi Dengan Kodim 0609/Cimahi. *KHAZANAH MULTIDISIPLIN*, 341-375.
- Supriyanto, M. (2025). Kolaborasi Kodam III/Siliwangi Dengan Pemerintah Daerah dalam Implementasi Program Ketahanan Pangan. *CENTURION MANAGEMENT, SOCIAL, POLITIC & DEFENSE JOURNAL, VOL 1, NO 1, Agustus 2025*.



-
- Purwanto, S., Purnomo, M. R., & Budiman, H. (2025). Power Dynamics in Decision Making: A Qualitative Analysis. *Power*, 2(1), 80-86.
- Purwanto, S., & Siagian, F. (2025). Strategic human resources management in the global era: Navigating opportunities and challenges. *Centurion MSPD Journal*, 1(1), 1-13.
- Purwanto, S., Wibowo, A., & Suharti, T. (2023). The OCB Determinant of Employees in Non-Profit Organization; Leadership Role and Work Engagement. *inovator*, 12(2), 251-263.
- Prasetiawan, H. P., AR, D. D., & Purwanto, S. (2025). THE STRATEGY TO IMPROVE THE CHARACTER OF MILITARY ACADEMY CADETS THROUGH THE ROLE OF MENTORS IN SHAPING PROFESSIONAL OFFICERS TO SUPPORT THE MAIN DUTIES OF THE INDONESIAN ARMY: *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 9(6), 2184-2191.
- Tjokro, V. A. (2025). Strategi Pembinaan Teritorial Tentara Indonesia Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional. *CENTURION MANAGEMENT, SOCIAL*,

3. Peraturan Dan dokumen :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakumhanneg) Tahun 2020–2024.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024,
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Program Swasembada Pangan.
- Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara (Jakgarhanneg) Tahun 2020–2024.
- Peraturan Kasad Nomor 69 Tahun 2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tugas Komando Daerah Militer
- Surat Kepala Bapennas Nomor 173/TS.02.02/K/7/2025 tertanggal 8 Juli 2025.



Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma (Tridek)

Doktrin KEP (Kartika Eka Paksi) dan Buku Petunjuk Induk Binter

4. Website/ internet :

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. (2023, Agustus 23). *Tidak Pandang Bulu, Krisis Pangan Hantui Seluruh Negara Tahun 2050* . Diambil kembali dari <https://www.bmkg.go.id/>: <https://www.bmkg.go.id/siaran-pers/tidak-pandang-bulu-krisis-pangan-hantui-seluruh-negara-tahun-2050>

Badan Pangan Nasional. (2022). *Indeks Ketahanan Pangan*. Jakarta: Badan Pangan Nasional.

Baresi, J. (2025, September 15). *Kemhan Bahas Ancaman Non-Militer di Era VUCA Hingga Fokus Krisis Pangan*. Diambil kembali dari <https://astakom.com/>: <https://astakom.com/2025/08/21/455688/kemhan-bahas-ancaman-non-militer-di-era-vuca-hingga-fokus-krisis-pangan/>

Burhanudin, A. (2025, Juni 19). *Komitmen Pangdam III/Siliwangi Dukung Ketahanan Pangan Nasional*. Diambil kembali dari <https://rri.co.id/>: <https://rri.co.id/bandung/nasional/1593002/about.html>

Diskominfo Indramayu. (2026, Januari 27). *Indramayu Perkuat Status Lumbung Pangan Nasional di Tengah Modernisasi Infrastruktur Jawa Barat*. Diambil kembali dari <https://indramayukab.go.id/>: <https://indramayukab.go.id/indramayu-perkuat-status-lumbung-pangan-nasional-di-tengah-modernisasi-infrastruktur-jawa-barat/>

Distanhorti Jabar . (2025, April 10). *Gubernur Jabar Dorong Pemulihan Tidak Hara Tanah untuk Pertanian* . Diambil kembali dari <https://distanhorti.jabarprov.go.id/postingan/gubernur-jabar-dorong-pemulihan-tidak-hara-tanah-untuk-pertanian-67f73539de6957bf76b47bbc>

enry, D. (2023, April 1). *Seiring Memburuknya Krisis Pangan, Tujuan PBB Mengakhiri Kelaparan pada 2030 Terancam Gagal*. Diambil kembali dari forestsnews.cifor.org: <https://forestsnews.cifor.org/83730/seiring-memburuknya-krisis-pangan-tujuan-pbb-mengakhiri-kelaparan-pada-2030-terancam-gagal?fnl=en>

Humas Perum BULOG. (2025, Juli 26). *Sinergi BULOG dengan TNI Dilanjutkan Melalui Gerakan Pangan Murah di YONIF 328/Dirgahayu, Cilodong*. Diambil kembali dari <https://www.bulog.co.id/>: <https://www.bulog.co.id/2025/07/26/sinergi-bulog-dengan-tni-dilanjutkan-melalui-gerakan-pangan-murah-di-yonif-328-dirgahayu-cilodong/>

indonesiadefense.com. (2025, Juli 25). *Menhan Sjafrie Tinjau Fasilitas Pendidikan TNI AD dan Dukung Ketahanan Pangan Nasional*. Diambil kembali dari indonesiadefense.com: <https://indonesiadefense.com/menhan-sjafrie-tinjau-fasilitas-pendidikan-tni-ad-dan-dukung-ketahanan-pangan-nasional/>



Kementerian Pertanian. (2024, Desember 31). Bentuk Brigade Pangan, Kementerian Pertanian Siap Menuju Swasembada Pangan. Indonesia.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2018, November 27). *Capaian Sektor Pertanian Hasil Kerjasama Kementan dengan TNI AD*. Diambil kembali dari <https://www.pertanian.go.id/>:
<https://www.pertanian.go.id/?show=news&act=view&id=3483>

News, A. (2025, Februari 8). *KSAD tekankan pentingnya pembinaan teritorial untuk ketahanan pangan*. (K. S. Simanjuntak, Pemain) Lapangan Makorem Wira Satya Denpasar, Denpasar, Bali.

Portal Jabar. (2024, Februari 23). *Tingkatkan Kemampuan Pertanian dan Peternakan, Ribuan Babinsa Ikuti Bimtek*. Diambil kembali dari <https://jabarprov.go.id/>:
<https://jabarprov.go.id/berita/tingkatkan-kemampuan-pertanian-dan-peternakan-ribuan-babinsa-ikuti-bimtek-12234>